

# PERILAKU PEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN KUDUS 2013

Fitriyah

## Abstract

*This study describes of Kudus Regency (Kabupaten Kudus) voting behaviour. Voting behavior is explained by three main approaches in the study of voting behavior, which are sociological models, psychological models and rational / economic model. Research was conducted in local election (Pilkada) Kudus Regency. The research is based on survey with a sample of 100 members who are chosen randomly. The study found that the economic models and candidate figure are the main factors. Also found that voters had permissive attitude to money politics.*

Key words: Perilaku pemilih, Pilkada, politik uang

## A. PENDAHULUAN

Tanggal 26 Mei 2013 Kabupaten Kudus menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada). Perilaku pemilih dalam Pilkada Kabupaten Kudus ini menarik diteliti karena Pilkada Kudus diselenggarakan serentak (Pilkada bersama) dengan Pilgub Jateng dan Kabupaten Temanggung. Pada Pilkada bersama ini bisa jadi pemilih mempunyai pilihan politik yang beda partai pengusung antar pilkada Kabupaten dan Pilkada Provinsi. Apalagi realitasnya pemilih di Kabupaten Kudus adalah pemilih yang terpolarisasi pada banyak partai politik dan cenderung cair, ini tergambar dari hasil Pemilu 2009 yang lalu, ketika dikonversi menjadi kursi DPRD Kudus memunculkan 16 partai politik yang memperoleh kursi. Pemilih cair ini bisa jadi baru akan membuat keputusan pilih siapa tepat pada hari pemilu.

Secara umum jumlah pemilih non-partisan, yakni sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu (Firmanzah, 2007: 58-59) menunjukkan kecenderungan meningkat pada setiap Pemilu, terutama di Pilkada. Kelompok pemilih ini belum tentu lebih mempertimbangkan program-program yang dijual oleh calon, melainkan faktor politik uang (transaksional) ikut berperan. Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah

Politik uang sebagai faktor yang menjadi pertimbangan pemilih makin marak. Fenomena politik uang ini sudah ada di Pemilu 2004 dan berulang di Pemilu 2009, dan pada semua Pilkada, bahkan ditengarai makin meningkat. Politik uang dalam suatu pemilihan di Indonesia bukanlah hal baru. Di Pemilihan kepala desa (Pilkades), yang sudah lama ditradisikan dalam memilih kepala desa secara langsung, juga lazim ada politik uang. Setidaknya ini dibuktikan dari studi Nico L. Kana (2001: 5-25) di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dan studi Halili (2009: 99-112) di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura. Dari latar belakang ini maka penulis membuat perumusan masalah "Apakah faktor politik uang menjadi faktor determinan yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilkada Kabupaten Kudus 2013?".

### A.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survai, adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989: 2). Lokasi penelitian di Kabupaten Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih yang terdaftar di Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kudus 2013, yakni sebanyak 600.195 pemilih. Sampel

penelitian sebanyak 100 responden dipilih dengan *multi-stage random sampling*. Dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus dipilih lima kecamatan secara random dengan teknik random sederhana, yakni mewakili kelompok perkotaan satu kecamatan dan mewakili kelompok perdesaan empat kecamatan. Selanjutnya dari masing-masing kecamatan terpilih, diambil dua desa dengan cara random. Cara random juga diberlakukan untuk memilih TPS. Setiap TPS selanjutnya diwakili dua orang pemilih laki-laki dan perempuan dengan ketentuan tidak boleh tinggal dalam rumah yang sama. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, hasilnya setelah melalui fase pengolahan data, dilakukan analisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang.

## A.2 Telaah Pustaka

Adman Nursal (2004: 5) menyebutkan ada 4 (empat) pendekatan untuk melihat perilaku pemilih, yakni (1) Pendekatan sosiologis (madzhab Columbia); (2) Pendekatan psikologis (madzhab Michigan); (3) Pendekatan rasional; dan (4) Pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing). Secara sosiologis perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan-pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun secara informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil). Ikatan-ikatan sosiologis semacam agama, kelas sosial, karakteristik demografis dan geografis, umur serta jenis kelamin, secara teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang. Sedangkan secara psikologis, perilaku memilih lebih dititik beratkan pada konsep sosialisasi dan sikap ketimbang pengelompokan sosial. Sosialisasi politik yang diterima (baik dari institusi formal maupun informal) sangat mempengaruhi sikap politik mereka. Selain itu sudut pandang psikologis ini juga menganggap sikap politik seseorang dalam memilih adalah refleksi kepribadiannya. Sikap memilih tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ikatan emosional pada suatu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada aspek psikologis pemilih. Menurut pendekatan ini, kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap partai/ kandidat tertentu bukan hanya karena partai/ kandidat mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara psikologis dekat dengan pemilih. Menurut model ini, Aspek sosiologis dan psikologis ini saling berkaitan (socio-psikologis). Faktor-faktor sosiologis tersebut tidak langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih, tapi diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik (Haris dan Syafarani, 2005: 98-99). Salah satu variabel utama dari pendekatan ini adalah identifikasi seseorang atau individu terhadap partai politik. Identifikasi Partai adalah perasaan keterlibatan dan memiliki yang terdapat dalam diri seseorang terhadap sebuah partai politik. Sehingga, ini bisa dikatakan sebagai sikap dan perasaan psikologis yang terdapat di dalam diri seseorang. Kedekatan ini umumnya terbangun dalam proses yang panjang. Identitas partai politik (*Party ID*) ini yang memperantarai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik (Eriyanto, 2007: 18)

Selain faktor sosiologis dan psikologis, Rui Antunes (exedrajournal.com, 2011) menambahkan faktor pilihan rasional sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Model rasional/ekonomi politik menekankan kepada penilaian rasional pemilih. Ahli politik mengadaptasi teori tentang ekonomi politik untuk menjelaskan perilaku pemilih dengan memperhitungkan apa dampak yang bisa dirasakan langsung oleh pemilih di masa datang kalau ia memilih partai

tertentu. Menurut model ini, pilihan terhadap partai politik/kandidat bukan hanya masalah psikologis dan partisanship tapi merupakan pertimbangan rasional terutama kemampuan dalam mengatasi dan menangani masalah ekonomi: Bagaimana seseorang memposisikan dirinya terhadap isu tertentu, dan bagaimana partai dan calon menyikapi isu-isu tersebut. Pertemuan antara posisi atau preferensi atas isu seorang pemilih dengan posisi atas isu yang sama dari calon atau partai politik menentukan perilaku memilih seseorang (Eriyanto, 2007:20)..

Perilaku pemilih menunjukkan dinamikanya. Sejumlah kajian menemukan kekuatan uang selanjutnya mulai menggeser faktor lain yang mempengaruhi perilaku memilih dalam pemilu juga pilkada. Ini antara lain dapat dilihat dari penelitian Abdur Rozaki Penelitiannya di Kecamatan Tanjung Bumi Madura menemukan, bahwa pada Pemilu 2004 ideologi kiai (yang kuat di Pemilu 1999) mendapatkan tandingan yang cukup signifikan, terutama munculnya kesadaran ideologis pemilih kepada ikatan kekerabatan (trah) serta ideologi uang. Politik uang adalah fenomena dalam Pilkada bisa disimak dari Veri Junaidi (2010: 41), yang menjelaskan bahwa terdapatnya sejumlah kasus politik uang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilkada, yakni yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sintang Kabupaten Tanjungbalai, Kabupaten Sumbawa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Profil Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kudus terletak diantara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2011 tercatat sebesar 769.904 jiwa, terdiri dari 382.021 jiwa laki-laki (49,62 persen) dan 387.883 jiwa perempuan (50,38 persen). Mayoritas penduduk Kabupaten Kudus beragama Islam, jumlahnya mencapai 97 persen. Dari aspek pendidikannya, masih ada penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak sekolah (5,87 persen), namun dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Kudus yang telah mencapai 96,67 persen, maka Kabupaten Kudus masuk kategori telah mencapai tuntas paripurna dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar 9 tahun. Dari mata pencaharian penduduk, Industri adalah lapangan kerja yang paling luas diakses penduduk (39,67 persen). Urutan berikutnya sektor jasa, yakni jasa perdagangan, hotel dan rumah makan (20,82 persen), dan jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan (10,38 persen) dan konstruksi (10,29 persen). Sektor pertanian (dalam arti luas) hanya menyerap 12,57 persen penduduk usia kerja. Ini menggambarkan Kabupaten Kudus adalah daerah industri dan jasa perdagangan.

### **B.2 Pilkada Kudus 2013 dan Perilaku Pemilih**

Pilkada Kabupaten Kudus 2013 diikuti oleh 5 pasangan calon. Selain calon yang diusung oleh koalisi partai-partai, juga diikuti calon dari jalur peseorangan. Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada Pilkada Kudus 2013, adalah: nomor urut satu, pasangan calon Muhammad Tamzil-Asyrofi yang

diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS). Nomor urut dua, pasangan calon Badri Hutomo-Sofiyan Hadi diusung Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Nomor urut tiga, pasangan calon perseorangan Erdi Nurkito-Anang Fahmi. Nomor urut empat, petahana Musthofa-Abdul Hamid yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Pelopor, PAN, dan PKS. Selanjutnya nomor urut lima, pasangan calon Budiyo-Sakiran yang diusung Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera (PDS), PNI Marhaenisme, dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDP). Pilkada Kudus ini dengan demikian diikuti petahana Bupati Mustofa, Wakil Bupati Budiono, mantan Bupati Muhamad Tamzil, dan mantan Sekretaris Daerah Badri Hutomo. Ada tiga calon wakil bupati yang berasal dari unsur NU. Ketiganya adalah Asyrofi Masitho (ketua Lakpesdam-NU), Sofyan Hadi (Sekjen Rabithah al-ma'ahid Al-Islamia, Asosiasi Pesantren Kudus) dan Abdul Hamid (wakil ketua PCNU).

Partisipasi pemilih pada Pilkada 2013 mencapai 79,28 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada 2008 yang hanya mencapai 56 persen, dan Pilgub Jateng 2008 yang hanya sebesar 31,8 persen, yang terendah di Jawa Tengah. Mayoritas responden (65 persen) menganggap menggunakan hak pilih adalah kewajibannya sebagai warga negara. Alasan memilih itu wajib menonjol pada pemilu masa Orde Baru, ketika itu pemerintah berhasil membentuk persepsi bahwa memilih sebagai kewajiban warga negara. Alasan berikutnya, sebanyak 24 persen responden menginginkan Kabupaten Kudus lebih maju. Dua alasan tersebut positif bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, yakni menunjukkan telah tumbuhnya sikap memiliki daerahnya (*political efficacy*) dan karenanya ingin terlibat mempengaruhi pengambilan keputusan memilih pemimpinnya. Pembuktian dari sikap ini adalah naiknya angka partisipasi di Pilkada Kudus 2013 yang signifikan dibandingkan Pilkada 2008.

Hasil hitung suara KPU menunjukkan Pasangan Muthofa-Abdul Hamid meraih suara terbanyak (48,33 persen). Ada beragam alasan yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kudus 2013. Visi, dan program adalah pertimbangan yang paling dipakai oleh pemilih (32 persen). Faktor pemberian uang/barang tidak menonjol, padahal hasil observasi di lapangan pada H-1 maupun hari pemungutan suara menunjukkan pemberian uang mewarnai Pilkada Kudus, praktek ini dilakukan oleh semua pasangan calon dengan jangkauan sebaran wilayah dan besaran uang yang bervariasi. Fakta bahwa semua pasangan calon membagi uang kepada pemilih menyebabkan faktor ini diabaikan ketika pemilih membuat keputusan memilih calon.

Tabel 1: Alasan Tidak Golput

No.	Alasan Gunakan Hak Pilih	Jumlah	%
1	Kewajiban	65	65,0
2	Ingin lebih maju	24	24,0
3	Ingin calon menang	5	5,0
4	Ikut-Ikutan (tetangga)	1	1,0
5	Karena diperintah	2	2,0
6	Diberi uang	2	2,0
7	Lain-lain	1	1,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

Tabel 2. Pertimbangan Memilih

No	Pertimbangan Pilih Calon	Jumlah	%
1	Idiologi	13	13,0
2	Visi, misi, program	32	32,0
3	Citranya baik	15	15,0
4	Pemimpin yang peduli	20	20,0
5	Mampu selesaikan masalah	5	5,0
6	Keuntungan langsung	2	2,0
7	Lingkungan (tetangga)	3	3,0
8	Pemberian uang/barang	3	3,0
9	Bupati/mantan bupati yg sukses	2	2,0
10	Lain-lain	5	7,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

### B.3 Faktor-Faktor Dalam Perilaku Pemilih

Figur calon merupakan faktor penting dalam Pilkada Kudus. Temuan ini memperkuat temuan-temuan penelitian sebelumnya seperti dalam Pilkada Kota Semarang 2010 dan Pilkada Batang 2011. Seperti halnya Pemilu Presiden, dalam Pilkada faktor figur calon berperan penting. Ada beberapa hal yang mendukung mengapa faktor figur calon penting. Faktor figur calon menjadi pertimbangan pemilih. Ukuran ideal pemimpin adalah cerdas, dermawan dan jujur. Dari kriteria tersebut faktor dermawan paling penting. Pemilih tidak melihat fisik menarik sebagai hal penting. Praktek Pilkada menunjukkan kebanyakan partai politik hanya punya peran dominan saat pencalonan, selanjutnya kendali diambil alih oleh calon. Hanya beberapa kasus yang menunjukkan mesin partai bekerja dalam Pilkada, seperti di Pilgub Jawa Tengah (Eriyanto dan Sukanta, 2008: 1-18). Demikian pula jika merujuk regulasi, maka calon yang menjadi peserta Pilkada. Misalnya tim kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh calon yang bersangkutan, demikian pula pada saat pemungutan suara pemilih mencoblos foto pasangan calon. Faktor sosiologis menunjuk pada karakteristik sosial yang melekat pada diri calon yang mempunyai kesamaan dengan karakteristik sosial pemilih, seperti persamaan agama, umur, jenis kelamin, dan asal daerah. Namun secara umum tidak ada perbedaan tajam dari aspek ini. Semua calon beragama Islam, yakni agama mayoritas di Kabupaten Kudus. Semua calon adalah laki-laki, faktor usia juga tidak bisa dipilah generasi tua dan muda, dan semuanya berasal dan/atau menetap di Kabupaten Kudus. Karakteristik sosial diduga hanya akan kelihatan dari persamaan afiliasi pada organisasi agama antara pemilih dengan pasangan calon, yakni antara sesama NU atau sesama Muhammadiyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persamaan afiliasi dengan organisasai agama Nahdatul Ulama (NU) antara pemilih dan calon, tidak menjadi pertimbangan memilih oleh mayoritas pemilih (63,2 persen) yang punya afiliasi dengan NU. Apalagi ada tiga pasangan calon yang berasal dari NU, yakni Asyrofi, Sofyan Hadi dan Abdul Hamid. Pola yang sama ditemukan pada pemilih yang berafiliasi dengan Muhammadiyah.

Faktor psikologis menunjuk pada faktor kedekatan pemilih dengan partai politik pengusung pasangan calon ataupun dengan calon yang bersangkutan. Pemilih nampaknya tidak melihatnya sebagai faktor penting. Ini karena karakteristik pemilih di Kabupaten Kudus sangat cair. pemilih juga tidak menunjukkan ada ikatan psikologis dengan calon sebagai dasar dalam menentukan pilihannya. 80 persen responden tidak merasa punya kedekatan khusus dengan pasangan calon yang ada.

Tabel 3. Faktor Figur Calon

No.	Figur Calon	Ya	Tidak
1	Cerdas	57,0	43,0
2	Dermawan	62,0	38,0
3	Jujur	57,0	43,0
4	Fisik menarik	36,0	64,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

Tabel 4. Faktor Ekonomis

No.	Figur Ekonomis	Ya	Tidak	Tdk Tahu
1	Visi, misi, program	53,0	47,0	0,0
2	Yakin mampu membangun Kudus	55,0	45,0	0,0
3	Terbukti mampu membangun Kudus	55,0	45,0	0,0
	Yakin, pasca Pilkada Kudus makin baik	63,0	17,0	20,0
4	Yakin, akan kerja untuk rakyat	62,0	15,0	23,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

Berbeda dari faktor sosiologis dan psikologis yang tidak menunjukkan peranannya, faktor ekonomis menjadi pertimbangan penting pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka dalam Pilkada Kudus 2013. Pemilih yang menilai Kondisi Kudus saat ini lebih baik cenderung memilih pasangan Musthofa-Hamid. Artinya mereka merasakan dibawah kepemimpinan Musthofa, inkumben, ada perubahan kondisi yang makin baik.

Terkait faktor politik uang, temuan penelitian ini menunjukkan Pemilih tidak mempertimbangkan faktor uang sebagai hal utama dalam memilih. Ini terjadi karena semua calon faktanya membagi uang dan politik uang dianggap wajar oleh pemilih. Sejalan dengan itu sifat kedermawanan adalah salah satu nilai utama seorang pemimpin. Mereka juga lebih mengapresiasi pemimpin yang peduli kepada rakyatnya.

Tabel 5. Terima Uang

No.	Menerima uang dari calon	Jumlah	%
1	Ya	68	68,0
2	Tidak	32	32,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah). 2013

Tabel 6. Terima Uang Dari Semua Calon

No.	Menerima uang dari semua calon	Jumlah	%
1	Ya	45	66,2
2	Tidak	23	33,8
Jumlah		68	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah). 2013

Temuan bahwa pemberian uang sebagai hal wajar dan bukan pertimbangan utama memilih memperkuat penelitian di Pilkada Semarang 2010 dan Pilkada Batang 2011. Pasangan Musthofa-Hamid yang dinilai pemilih paling membagi uang, perolehan suaranya di peringkat pertama. Namun mayoritas pemilih juga menilai Musthofa mampu membawa kondisi Kudus sekarang lebih baik, mereka cenderung memberikan suaranya ke Musthofa. Sementara yang menilai kondisinya sama saja cenderung memberikan suaranya ke Badri Hutomo (mantan sekretaris daerah), bukan ke Tamzil (mantan bupati).

Tabel 7. Pilih Yang Memberi Uang

No.	Pilih yang memberi uang	Jumlah	%
1	Ya	38	55,9
2	Tidak	30	44,1
Jumlah		68	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

Tabel 8. Bukan Karena Faktor Uang

No.	Pilih calon bukan karena faktor uang	Jumlah	%
1	Memilih sesuai hati nurani	40	64,5
2	Uang itu rejeki, bukan balas budi	6	9,7
3	Semua calon memberi	2	3,2
4	Sudah punya calon	9	14,5
5	lainnya	5	8,1
Jumlah		62	100,0

Sumber: Kuesioner (diolah), 2013

Penelitian ini juga menemukan kemenangan Musthofa-Abdul Hamid didukung oleh pemilih dengan dengan karakteristik perempuan yang bekerja, pemilih usia matang, mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan dan guru dan pemilih yang pendidikannya rendah. Pesaing utamanya, Tamzil-Asyrofi, punya karakteristik berbeda, yakni laki-laki, kalau perempuan adalah ibu rumah tangga, pemilih muda, latar belakang pekerjaan buruh dan swasta. Namun sebagaimana Musthofa-Abdul Hamid, pasangan ini juga kuat disegmen pemilih dengan penghasilan rendah.

### C. PENUTUP

Penelitian ini menemukan adanya praktik politik uang dalam Pilkada Kudus 2013, namun belum mampu membuktikan bahwa faktor uang sebagai faktor dominan mempengaruhi perilaku pemilih dalam Pilkada. Karena itu perlu ada kajian lebih mendalam mengenai makna uang dalam Pilkada Kudus.

### DAFTAR RUJUKAN

- Antunes, Rui, Theoretical models of voting behavior (diunduh dari [www.exedrajournal.com/.../10C\\_Rui-Antunes...](http://www.exedrajournal.com/.../10C_Rui-Antunes...), 5 Desember 2011)
- Eriyanto, "Studi Perilaku Pemilih", *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 06 Oktober 2007 (diakses dari [www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id), 5 Desember 2010)
- Eriyanto dan Sukanta, "Kasus Pilkada Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat", *Kajian Bulanan LSI*, Edisi 15 Juli 2008 (diakses dari [www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id), 5 Desember 2010)
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Halili, "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura", *Jurnal Humaniora*, Volume 14, Nomor 2, Lemlit UNY, Oktober 2009, Hlm. 99 – 112
- Haris, Syamsuddin Haris dan Tri Rainni Syafarani, "Pola dan Kecenderungan Perilaku Memilih" dalam Lili Romli dkk, *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: P2p-LIPI, 2005, Hlm. 98-99
- Junaidi, Veri, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat Dalam Pilkada Tahun 2010", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, Hlm. 41-72
- Kana, Nico L., "Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Renai* Tahun 1, No.2, April-Mei 2001, Hlm. 5-25
- Nursal, Adman, *Political Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2004
- Singrimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.), 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES